

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi

1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2010-2015 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SLEMAN YANG LEBIH SEJAHTERA LAHIR BATIN, BERDAYA SAING, DAN BERKEADILAN GENDER PADA TAHUN 2015”**.

2. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat
- c. meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- d. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- e. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu perubahan secara mendasar, terencana dan terukur. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 mengacu pada tiga arus utama perubahan (*3R-Change*), yaitu dengan mengubah haluan (Reorientasi), penempatan diri yang proporsional (Reposisi), dan bersandar pada kekuatan rencana yang baik (Revitalisasi).

1. Reorientasi, Reposisi Dan Revitalisasi

a) Reorientasi

Reorientasi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi lebih cepat, mudah, bermutu dan adil. Reorientasi juga menyangkut perubahan cara pandang, cara mengelola sumberdaya dan cara bertindak aparat Pemerintah Kabupaten Sleman yang lebih efisien dan efektif dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Reorientasi dilakukan melalui berbagai upaya pengembangan sumberdaya manusia aparat pemerintah yang profesional, bersih, berwibawa, tunduk pada hukum, serta taat pada norma umum yang berlaku.

Reorientasi juga menyangkut pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang harus dirasakan adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, tetapi juga meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai adalah pertumbuhan yang lebih berkualitas yang disertai dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, manajemen pembangunan harus diarahkan untuk memacu pemerataan melalui pertumbuhan. Reorientasi dilakukan pula dengan mengutamakan pembangunan kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, strategi, kebijakan dan program pembangunan diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

b) Reposisi

Reposisi dimaksudkan untuk menegaskan dan menguatkan peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi berbagai kebijakan dan program pembangunan. Reposisi berarti juga pelaksanaan peran dan fungsi Pemerintah Pusat dan Provinsi di daerah secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sleman memegang peran sentral dalam

percepatan, fasilitasi, integrasi dan distribusi pembangunan yang maju dengan tetap dalam konteks nasional. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah akan mendorong kemandirian daerah dengan pengelolaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan produktif. Reposisi juga berkaitan dengan perubahan paradigma dari penerima yang pasif menjadi penyumbang yang aktif pada pencapaian tujuan pembangunan, dan perubahan paradigma dari mengatur ke dalam (*inward looking*) menjadi mencari ke luar (*outward looking*).

Reposisi ini berarti kemajuan hanya dapat dicapai melalui upaya sinergis yang memadukan semua unsur kekuatan dan berbasis pada kemampuan daerah. Oleh karena itu, kerjasama nasional dan internasional yang saling menguntungkan harus dibangun secara intensif sebagai sarana percepatan pembangunan. Reposisi tersebut mengharuskan perbedaan pola kerja dari para pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman agar tidak sepenuhnya menggantungkan pada kekuatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang tersedia, tetapi harus mampu membangun jejaring yang luas dalam pembiayaan, pengembangan pasar, dan investasi.

Konsekuensi dari paradigma baru tersebut adalah perbaikan pelayanan ke dalam, kemudahan akses dan kepercayaan yang tinggi dari luar. Pimpinan daerah harus mampu menjadi pembangun birokrasi yang bersih dengan pelayanan efektif dan efisien. Pemikiran ini juga sejalan dengan arah baru pembangunan daerah yang menuju kemandirian ekonomi yang berarti menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri.

c) Revitalisasi

Berdasarkan pemikiran Reorientasi dan Reposisi, Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai perencana, pelaksana, dan penyedia dana pembangunan harus melakukan revitalisasi dalam merumuskan satu acuan pembangunan sebagai peta jalan (*road map*) menuju kesejahteraan. Perencanaan merupakan kewajiban pimpinan tertinggi di

daerah yang didelegasikan kepada SKPD terkait.

Revitalisasi dimaksudkan untuk menguatkan kembali perencanaan pembangunan dan lembaga perencana. Dalam satu daerah hanya ada satu rencana pembangunan induk yang menjadi acuan semua pihak terkait dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pembiayaan. Hal ini memungkinkan terjadinya keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga lebih efektif, efisien dan profesional. Selain itu, revitalisasi dimaksudkan untuk mengangkat nilai budaya dalam menyusun perencanaan pembangunan sehingga ciri khas daerah menjadi yang utama dan nyata. Dalam perspektif ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai budaya, norma, dan kearifan daerah.

2. Strategi

Strategi pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 sebagai berikut:

a. Strategi mewujudkan misi satu

Dalam upaya mewujudkan Misi satu, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.
- 2) Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
- 4) Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban



- 5) Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
- 7) Melakukan evaluasi dan penataan ulang organisasi perangkat daerah sesuai dengan tuntutan kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang ada.
- 8) Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak

b. Strategi mewujudkan Misi dua

Dalam upaya mewujudkan Misi dua, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

- 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem penjaminan kesehatan bagi masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan keakurasian data dan informasi kependudukan
- 5) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan serta keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga
- 7) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.



c. Strategi untuk mewujudkan Misi tiga

Dalam upaya mewujudkan Misi tiga, yaitu Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan, strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

- 1) Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik berat agribisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
- 2) Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
- 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin dan berwawasan gender melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat.

d. Strategi untuk mewujudkan Misi empat

Dalam upaya mewujudkan Misi empat, yaitu Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

- 1) Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- 2) Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang
- 3) Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup



e. Strategi untuk mewujudkan Misi lima

Dalam upaya mewujudkan Misi lima, yaitu Meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan di segala bidang strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

- 1) Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam pembangunan

3. Arah Kebijakan

a. Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi satu

Arah kebijakan untuk mendukung terwujudnya misi satu, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat adalah:

- 1) Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.
- 2) Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.
- 3) Mendorong tersedianya data dan informasi yang memadai untuk perencanaan pembangunan.
- 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan melalui partisipasi masyarakat.
- 6) Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.
- 7) Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.
- 8) Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.



- 9) Peningkatan intensitas dan efektifitas kerjasama lintas wilayah, perguruan tinggi, organisasi profesi dan swasta.

b. Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi dua

Arah kebijakan untuk mendukung terwujudnya Misi dua, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 5) Meningkatkan kualitas generasi muda dan olah raga.
- 6) Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.

c. Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi tiga

Arah kebijakan untuk mendukung terwujudnya Misi tiga, yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan adalah:

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 2) Meningkatkan produk dan produktivitas industri UMKM berorientasi pasar.
- 3) Meningkatkan keamanan dan kelancaran distribusi perdagangan.
- 4) Pengembangan dan pemasaran produk pariwisata.
- 5) Meningkatkan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan.
- 6) Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja.

d. Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi empat

Arah kebijakan untuk mendukung terwujudnya Misi empat, yaitu memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah:



- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
- 2) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
- 4) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
- 5) Mendorong tersedianya energi listrik bagi seluruh masyarakat melalui pengembangan energi alternatif dan jaringan listrik negara.
- 6) Meningkatkan upaya-upaya antisipatif terhadap dinamika perubahan iklim.

e. Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi lima

Arah kebijakan untuk mendukung terwujudnya Misi lima, Meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan di segala bidang adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.

C. PRIORITAS DAERAH

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD tahun 2011-2015 serta realisasi pembangunan tahun 2012 dan perkiraan pencapaian tahun 2013, maka tema pembangunan daerah tahun 2014 adalah: “Peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang didukung oleh peningkatan pelayanan publik, Infrastruktur yang lebih memadai, berwawasan lingkungan, dan keamanan yang kondusif” . Isu Strategis tahun 2014 :

1. Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi;



2. Prosentase penduduk miskin masih tinggi;
3. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat yang kurang membudaya;
4. Sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai;
5. Pelayanan kepada masyarakat belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan belum terintegrasi;
6. Prasarana dan sarana infrastruktur belum seluruhnya dalam kondisi baik;
7. Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak kurang optimal;
8. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
9. Prasarana dan sarana pengurangan resiko bencana kurang memadai;
10. Potensi gangguan keamanan dan ketertiban berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan legislatif dan Presiden.

Prioritas pembangunan tahun 2014 tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran, dan indikator sasaran, kebijakan dan program pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD tahun 2011-2015.

Tabel 2.1
Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2014

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH
1	2	3
1	Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan masyarakat	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatnya penanaman modal
2	Penanggulangan kemiskinan;	3. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS 4. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan 5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
3	Peningkatan kualitas kesehatan	6. Meningkatnya derajat kesehatan
4	Peningkatan kualitas pendidikan;	7. Meningkatnya kualitas pendidikan 8. Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga



1	2	3
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;	9. Meningkatnya kualitas SDM aparat 10. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi 11. Meningkatnya transparansi 12. Meningkatnya pelayanan masyarakat 13. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 14. Meningkatnya kerjasama daerah 15. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan 16. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah 17. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat 18. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik 19. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM 20. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya
6	Peningkatan kualitas sarana prasarana publik;	21. Meningkatnya prasarana dan sarana jalan 22. Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi 23. Meningkatnya prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi 24. Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman 25. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian 26. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga 27. Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan 28. Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan
7	Peningkatan kesetaraan gender	29. Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak 30. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
8	Menjaga stabilitas ketahanan pangan;	31. Meningkatnya Produksi pangan
9	Peningkatan pengelolaan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;	32. Meningkatnya penanggulangan bencana 33. Meningkatnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana 34. Menjaga kualitas sumberdaya alam 35. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 36. Meningkatnya Pemanfaatan sumberdaya energi
10	Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban;	37. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat 38. Meningkatnya kerukunan masyarakat